

**EVALUASI PROGRAM “GAMMARA”  
SEBAGAI *CITY BRAND* DI KABUPATEN JENEPONTO**

**ALWI**

Nomor Stambuk :

105640163612



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

EVALUASI PROGRAM GAMMARA  
SEBAGAI *CITY BRAND* DI KABUPATEN JENEPONTO

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan Oleh

**ALWI**

Nomor Stanbuk : 105640163612

Kepada

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Evaluasi Program Gammara Sebagai *City Brand* Di  
Kabupaten Jeneponto

Nama Mahasiswa : Alwi

Nomor Stambuk : 105640163612

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Muhammadiyah, MM

  
Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan Ilmu pemerintahan

Fisipol Unismuh Makassar

Fisipol Unismuh Makassar

  
Dr. H. Irwani Malik, S.Sos, M.Si

  
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.SI

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor :0047/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2019.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**



**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

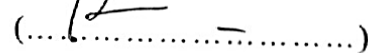
Penguji :

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)



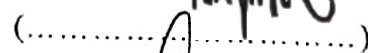
(.....)

2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd



(.....)

3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



(.....)

4. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP



(.....)

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Alwi

Nomor Stambuk : 105640163612

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 17 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



ALWI



## ABSTRAK

**Alwi 2019: Evaluasi Program “Gammara” sebagai *city brand* di Kabupaten Jeneponto** (dibimbing oleh; H.Muuhammadiya & Ahmad Taufik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil Evaluasi Program Gammara sebagai *city brand* di kabupaten jeneponto, jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan informan penelitian 7 orang dari dinas lingkungan hidup kabupaten jeneponto. Teknik yang digunakan dalam himpunan data dalam penelitian berupa, observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap informan, data tersebut di analisis secara deskriptif kepada informan dengan melakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa problem yang menjadi penghambat tercapainya program Gammara yang berada di kabupaten Jeneponto untuk mendapatkan penghargaan ADIPURA, dapat dilihat dari beberapa fakto ***Efektifitas***: Belum dikatakan efektif dari segi anggaran yang masih minim sehingga pelaksanaan program tidak sesuai dengan anggaran yang ada, saat ini tingkat pencapaiannya baru sekitar 60%. ***Efesiensi***: Usaha yang dilaksanakan dinas Lingkungan Hidup sudah cukup memuaskan, pada pelaksanaan sosialisai pengelolaan sampah tentang pengelolaan daur ulang kemudian memberikan program kelestarian pada fungsi lingkungan misalkan pembuatan embun dan pembuatan lubang cerdas bioforit untuk penanganan sampah organik dan pemeliharaan mata air itu. ***Kecukupan***: telah memenuhi pencapaiannya hal itu dapat dilihat dari adanya bank sampah di beberapa sekolah yang saat ini mulai di fungsikan oleh para siswa dan pengawasan limbah B3 pada bengkel, tambang udang dan juga limbah medis yang telah mulai dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. ***Responsivitas*** sudah cukup memuaskan, dapat dilihat dari kecepatan dinas lingkungan dalam menata setiap taman yang ada dan secara langsung memerintahkan petugas kebersihan untuk menjalankan tugasnya tanpa menunggu komplek dari masyarakat. ***Faktor Pendukung***: Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai. ***Faktor penghambat*** : Komitmen Pemerintah yang masih tidak dapat memfokuskan program Gammara mengingat masi banyaknya yang harus di benahi di Jeneponto dan Faktor Geografis yang musim kemaraunya lebih panjang dari pada musim hujannya ***Penegakan Pemda***: Dikarnakan masi banyaknya Ternah yang masi berkeliaran di poros jalan Kabupaten Jeneponto.

***Keyword*** : *Evaluasi, program Gammara, city brand*

## KATA PENGANTAR



*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Gammara Sebagai *City Brand* di Kabupaten Jeneponto” dapat diselesaikan. Salawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak H.Hanafi dan ibu Hj. Nurhasni yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudariku tercinta Andriana, Arnila dan Anhari yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah

mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Muhammadiyah, M.M, Bapak Ahmad Taufik, S.IP., M.AP. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Nuryanti Mustari, S.IP., M. Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
5. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I. Selaku sekertaris Jurusan Ilmu Pemerintahan
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Dinas Lingkungan Hidup Jeneponto, Petugas Kebersihan Jeneponto dan Masyarakat Jeneponto, yang telah bekerjasama selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.




9. Seluruh saudara angkatan 2012 dan adik-adik pada Ilmu Pemerintahan tak terkecuali saudara-saudaraku di KPA SAYAP, sahabat-sahabat dan teman-teman, yang telah menjadi keluarga bagi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, tak ada ilmu yang memiliki kebenaran mutlak, tak ada kekuatan dan kesempurnaan, semuanya hanya milik Allah SWT, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini senantiasa dinantikan dengan penuh keterbukaan.

*Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 03 Agustus 2019



Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik .....	7
B. Tinjauan Evaluasi Kebijakan Publik .....	11
C. Konsep Jeneponto “GAMMARA” .....	24
D. Kerangka Fikir .....	27
E. Fokus Penelitian .....	27
F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Teknik Keabsahan Data .....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Atau Karakteristik Objek Penelitian .....	36
B. Evaluasi Program Gammara Sebagai <i>City Brang</i> Di Kab. Jeneponto .....	45
C. Fakrot Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Gammara Pada Dinas Lingkungan Di Kab. Jeneponto .....	60
BAB V KESIMPULAN .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan kerangka Fikir .....	27
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup .....	44



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan.....	37
Tabel 2. Pertumbuhan Penduduk Tahun 2008-2012.....	40
Tabel 3. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018.....	41
Tabel 4. Penduduk Menurut Kec. dan Agama Tahun 2012.....	43
Tabel 5. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	46
Tabel 6. karakteristik informan berdasarkan umur .....	47
Tabel 7. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	48
Tabel 8. karakteristik informan berdasarkan pekerjaan .....	49
Tabel 9. Fasilitas yang dimiliki dinas lingkungan hidup .....	49



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluru tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam pembukaan UUD 1945.

Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikianrupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teratur maka pembangunan dapat dilaksanakan.

Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan daerah, dimana pada hakekatnya daerah menjadi tempat terakumulasinya program-program pembangunan. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinegris dan terarah apabila diawali dengan perancangan yang matang dan propesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perancangan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu di perlukan untuk menjamin laju perkembangan di daerah, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materi dan spiritual. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap



dan mandiri dalam menyusun strategi sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Konsep pembangunan daerah harus tetap berada dalam bingkai pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua mitra dan aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial, budaya, ideologi, maupun stabilitas negara.

Pemerintah daerah sebagian dari pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan wilayah sesuai dengan konteks sosial budayanya. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang kemudian direvisi kembali dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 yang selanjutnya diundat-undangkan dalam undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah, pasal 12 menegaskan urusan wajib pemerintah daerah meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman pemukiman umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial menjadi tanggung jawab daerah yang mengurusinya.

Bupati Jeneponto mengharapkan program Jeneponto Gamara yang ia harapkan bertujuan sebagai bentuk usaha untuk merealisasikan janji-janji segala sesuatu yang menjadi kewajiban pemerintah untuk membawa Jeneponto menjadi daerah lebih berkembang dan maju, serta memiliki daya saing dan usaha untuk menghilangkan image daerah yang tertinggal.

Pemerintah jeneponto memberikan kontribusinya semaksimal mungkin untuk kembali membenahi jeneponto lebih baik lagi.

*Tagline* Gammara (Gerakan bersama menuju jeneponto ramah) dikeluarkan sebagai sesuatu gerakan untuk membawa jeneponto dalam suatu perubahan yang signifikan, dalam hal ini perubahan aspek positif. Gambar sendiri dibuat sebagai bentuk usaha pemerintah mengajak masyarakat ikut serta andil dalam prograam pemerintah yang ada saat kampanye yang berusaha untuk ditepatinya. Bupati Jeneponto mengeluarkan keputusan Nomor 61 tahun 2015 tentang sistem pemilahan dan pemisahan sampah menuju Kabupaten Jeneponto yang bersih dan hijau. Untuk mewujudkan jeneponto yang lebih baik, Gammara juga dibuat agar peraturan-peraturan daerah dapat diterima di dalam masyarakat dalam hal ini perwujudan perda-perda yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat seperti Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto tahun 2012-2031, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Bupati Jeneponto mengeluarkan keputusan Nomor 38 Tahun 2015 tentang pembentukan pengurus buletin Gammara Kabupaten Jeneponto 2015.

Dalam program tersebut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, bukan hanya untuk mengejar gelar kota adipura, melainkan program ini dikeluarkan untuk merubah dan menata kembali Kabupaten Jeneponto, sebagaimana telah disinggung bahwa Kabupaten Jeneponto dijuluki sebagai kabupaten terbelakan dan kota gersang, sehingga dengan dikeluarkannya program ini dapat merubah

Kabupaten Jeneponto menjadi lebih baik lagi seperti singkatan Gammara itu sendiri.

Keberhasilan program Gammara ini bukan hanya bergantung kepada Bupati ataupun aparat penyelenggara yang terkait saja. Namun masyarakat ikut serta dalam mensukseskan program tersebut. Wujud dari ikut serta masyarakat dengan mendukung program-program Gammara melalui partisipasi dalam setiap pelaksanaan program dari kebijakan tersebut.

Pelaksanaan program Gammara sampai saat ini masih belum baik. Hal ini dapat di lihat dengan masih adanya beberapa masyarakat yang kurang paham dengan program Gammara tersebut. Masyarakat mengetahui program Gammara ini melalui spanduk-spanduk ataupun pada saat kampanye bupati terpilih, mereka hanya mengetahui kepanjangan dari program Gammara namun partisipasinya masih kurang efektif dalam melancarkan program Gammara tersebut.

Buktinya pada bidang kebersihan lingkungan, masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan masih sangat rendah. Masyarakat masih beranggapan bahwa yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengelolah kebersihan lingkungan adalah petugas kebersihan, buktinya masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam membersihkan lingkungan jika ada kegiatan yang sifatnya insentil seperti memperingati hari besar ataupun kedatangan tamu atau intruksi dari tokoh masyarakat setempat. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka kemudian peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai **“Evaluasi Program Gammara Sebagai City Brand di Kabupaten Jeneponto”** yang tepatnya pada dinas lingkungan

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis kemudian menarik rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Evaluasi pelaksanaan program Gammara di Kabupaten Jeneponto ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Gammara di Kabupaten Jeneponto ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui Evaluasi terhadap pelaksanaan program Gammara di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2014.
  - b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendorong terhadap pelaksanaan program Gammara di Kabupaten Jeneponto.
2. Manfaat penelitian
  - a. Manfaat akademis  
 Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang di dapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah di atas.
  - b. Manfaat teoritis  
 Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu sosial dan ilmu politik.

c. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Jenepono.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Pada dasarnya sesuatu kebijakan sangatlah berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebijakan (*virtues*). Winarno dan Wahab dalam suharno (2013:13) sepakat bahwa istilah kebijakan dalam penggunaannya kerap kali di pertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuannya (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar proposal, dan *grand design*. Bagi para pembuat kebijakan, mungkin istilah-istilah tersebut tidak bermasalah. Namun bagi mereka yang berada diluar struktur pembuatan dan pengambilan kebijakan, mungkin hal ini akan membingungkan.

Menurut suharno (2013:3) terdapat banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan (*policy*), karena pada dasarnya setiap ahli memiliki pengertian dan makna masing-masing dari setiap kebijakan. Dari pengertian tersebut akan menghasilkan penekanan-penekanan tersendiri yang berbeda-beda. Perbedaan ini menimbulkan latar belakang yang berbeda-beda pula.

##### 1. Pengertian kebijakan publik

Menurut Sulisto (2013:3) kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama aktor-aktor ahli politik dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik guna kepentingan masyarakat. Nugroho (2011:96) menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki pada transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-

citakan. Sedangkan menurut Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2011:93) kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu.

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah dan bersama dengan aktor politik dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan publik guna mencapai tujuan yang diinginkan demi kepentingan khalayak ramai.

## 2. Tahap-tahap kebijakan publik

Telah diuraikan di atas mengenai apa itu kebijakan publik. Secara sederhana dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah produk (*output*) pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pemecahan masalah-masalah publik yang dianggap *urgent* demi kesejahteraan masyarakat. Pengadaan sebuah produk dalam hal ini adalah sebuah kebijakan publik, bukanlah barang instan yang serta-merta hadir seketika ketika datang sebuah permasalahan publik, tentu terdapat proses atau tahap-tahap dalam pembuatan sebuah kebijakan. Seperti yang dijelaskan William Dumn (1998:24) bahwa tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

### a. Penyusunan agenda

Agenda *setting* sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam tahap kebijakan publik. Dalam fase inilah kemudian ditentukan mana permasalahan publik dan prioritas yang menjadi urgensi pada saat itu. Jika sebuah isu publik mendapatkan kedudukan sebagai masalah publik

dan mendapat prioritas dalam agenda publik, maka isu publik tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya yang lebih dari pada isu publik lainnya.

Dalam fase ini sangat penting untuk dapat menentukan isu kebijakan yang akan dijadikan masalah kebijakan dalam suatu agenda pemerintah.

Isu kebijakan biasanya mencul ketika terjadi perang pendapat antar aktor mengenai tindakan yang akan maupun yang telah ditempuh, maupun pertentangan mengenai nilai pandang dari karakter masalah tersebut.

b. Formulasi kebijakan

Masalah yang telah berhasil masuk dalam agenda pemerintah, kemudian diolah dan didefinisikan oleh para pembuat kebijakan untuk dapat ditentukan alternatif-alternatif kebijakan sebagai solusi dari masalah kebijakan tersebut. Sama halnya dengan pemilihan isu masalah, pemilihan alternatif kebijakan sebagai solusi pemecah masalah kebijakan juga dipilih dan diseleksi agar dapat pilihan alternatif terbaik untuk memecahkan masalah kebijakan.

c. Adopsi/legitimasi kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah tindakan yang sah, yaitu dengan mendukung.

Dukungan untuk semua rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota

mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses orang belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi kebijakan

Semua program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada implementasi ini sebagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementers*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Penilaian/evaluasi kebijakan

Secara umum, evaluasi merupakan fase atau tahapan fungsi yang berkaitan dengan estimasi dan nilai dari sebuah kebijakan. Evaluasi bukan hanya sekedar sebuah tahapan yang akan dilakukan pada agenda terakhir sebuah proses kebijakan. Namun juga mencakup seluruh aspek dalam sebuah kebijakan. Mulai dari perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk memecahkan masalah kebijakan, implementasi kebijakan hingga dampak yang ditimbulkan dari kebijakan itu sendiri.

## B. Tinjauan Evaluasi Kebijakan Publik

Kegiatan evaluasi merupakan sebuah tahapan dalam sebuah proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini dapat memberikan suatu nilai terhadap suatu kebijakan publik yang diimplementasikan (Suharno, 2013:219). Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, yaitu untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil seperti yang diinginkan. Oleh karenanya, sebuah evaluasi perlu dilakukan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut memiliki dampak seperti yang diharapkan.

Suharno (2013:221) mengatakan, salah satu alasan mengapa sebuah evaluasi harus dilaksanakan jika ditinjau dari dimensi internal, yaitu untuk menjamin terhindarnya pengulangan kesalahan (*guarantee to non-recurrence*). Sebab, informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa, atau kebijakan lainnya dalam masa yang akan datang. Sejalan dengan alasan internal kedua yang dikembangkan oleh Suharno (2013:221) bahwa alasan dilakukannya sebuah evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan, dalam penelitian ini pula hal yang sama dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui apakah pembangunan dan pelaksanaan tata kelola Plaza Bandar Jaya telah sesuai dan berhasil dengan tujuan dari pembangunan dan pelaksanaan tata kelola Plaza Bandar Jaya.



## 1. Pengertian evaluasi kebijakan

Menurut Winarno (2014:228-229) penilaian atau evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun pada semua proses kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan evaluasi adalah kegiatan penilaian kegiatan yang bertujuan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai dampak yang diharapkan. Oleh karenanya, penilaian atau evaluasi dapat menangkap tentang isi kebijakan, penilaian kebijakan, dan dampak kebijakan.

Menurut Arikunto (2013:36) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tetap dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Menurut Anderson dalam Sulistio (2012:52), Evaluasi kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Oleh karena itu kegiatan evaluasi adalah kegiatan fungsional yang meliputi perumusan kebijakan publik, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan,

implementasi maupun dampak dari kebijakan itu sendiri. Sebab evaluasi kebijakan erat kaitannya dengan dampak dari suatu kebijakan pemerintah.

Setiap kebijakan akan selalu menghasilkan dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Sebuah evaluasi kebijakan biasanya ditinjau untuk melihat sejauh mana ke efektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh kesenjangan antara “harapan” dan keyakinan.

Dari berbagai pengertian evaluasi kebijakan di atas, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah sebuah proses penilaian atau pengukuran apakah sebuah kebijakan telah berjalan sesuai seperti apa yang telah ditentukan, baik itu dampak yang dihasilkan maupun proses pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Hal ini berdasarkan kata kunci yang sering kita temukan yaitu diantaranya adalah pengukuran, penilaian, pelaksanaan, hasil dan dampak. Dilihat dari urgensi pelaksanaan kegiatan evaluasi kebijakan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis perlu mengetahui berbagai pendekatan evaluasi yang kelak akan digunakan dalam pelaksanaan evaluasi itu sendiri, di antaranya adalah sebagai pendekatan evaluasi kebijakan.

Suharno (2013:224-227) mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan besar dalam evaluasi kebijakan, yakni:

a. Evaluasi semu

Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang

hasil kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan manfaat dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran, dan masyarakat skala luas. Analisis yang menggunakan pendekatan ini berpendapat bahwa nilai dan manfaat sesuatu kebijakan akan dirasakan secara otomatis dan terbukti dengan sendirinya oleh individu, kelompok, maupun masyarakat.

b. Evaluasi formal

Evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menghimpun informasi valid dengan metode-metode deskriptif mengenai hasil kebijakan dengan tetap melakukan hasil evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuana yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga administratif lainnya. Pendekatan berasumsi bahwa pencapaian dan tujuan yang telah diumumkan secara formal adalah ukuran yang tepat untuk menilai dan mengevaluasi dari manfaat dari sebuah kebijakan.

Evaluasi formal terdiri dari evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi yang bersifat sumatif adalah evaluasi yang segera dilakukan setelah sebuah kebijakan selesai dilaksanakan yang telah ditetapkan jangka waktunya, baik itu jangka pendek maupun menengah. Sedangkan evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang relatif panjang agar dapat terus memantau pencapaian dan tujuan dari sebuah kebijakan.

c. Evaluasi keputusan teoritis

Evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*) adalah kegiatan evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk mengumpulkan informasi yang valid dan akuntabel mengenai hasil kebijakan, yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan. Evaluasi jenis ini bertujuan untuk menghubungkan antara hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari para pelaku kebijakan.

Perbedaan mendasar evaluasi ini dengan dua jenis pendekatan evaluasi sebelumnya adalah bahwa evaluasi ini berusaha menemukan dan mengeksplisitkan apa yang menjadi target dan tujuan dari para pelaku kebijakan, baik itu yang nyata maupun yang tersembunyi. Sehingga individu maupun lembaga yang melaksanakan kebijakan baik dari level terendah hingga yang paling tinggi dilibatkan dalam mengukur keberhasilan pencapaian target dan tujuan suatu kebijakan. Terdapat 2 (dua) jenis evaluasi keputusan teoritis, yaitu penilaian evaluabilitas (*evaluability assessment*) dan analisis utilitas multi atribut.

Penilaian evaluabilitas adalah serangkaian prosedur yang dilakukan untuk menganalisis sistem pembuatan keputusan. Hal ini dimaksud guna memperoleh sejumlah informasi yang berkaitan dengan kinerja kebijakan, serta memperjelas apa yang menjadi tujuan, sarana, dan asumsi-asumsi yang dicapai dengan kinerja tersebut. Sedangkan analisis utilitas multi atribut adalah serangkaian prosedur yang ditetapkan guna memperoleh penilaian subjektif terhadap para pelaku kebijakan mengenai nilai dari hasil sebuah

kebijakan. Analisis ini dapat menunjukkan secara eksplisit penentuan nilai dari para pelaku kebijakan serta keragaman tujuan para pelaku kebijakan.

## 2. Tipe-tipe riset evaluasi kebijakan publik

Langbein dalam widodo (2001:215) menyebutkan terdapat 2 (dua) tipe riset evaluasi (*type of evaluation research*) yaitu riset *process* dan riset *outcomes*, dan metodenya dibedakan menjadi 2 (dua) juga, yaitu metode deskriptif dan metode kausal. Riset yang menfokuskan pada proses, maka ia akan senantiasa mendasarkan pada *guide line*, yaitu tentang bagaimana prosedur dan administrasinya, yang dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis.

Dengan kata lain, yang menjadi indikator keberhasilan sebuah kebijakan dalam tipe riset ini adalah kesesuaian proses implementasi sebuah kebijakan publik melalui gratis petunjuk (*guide lines*) yang telah ditentukan. Terdapat beberapa pertanyaan mendasar dalam riset evaluasi proses, di antaranya: apakah kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk/pedoman yang telah ditetapkan; apakah fasilitas dan sumber daya yang digunakan dalam kebijakan telah terpenuhi bagaimana derajat manfaat/keuntungan yang ditetapkan dalam kebijakan telah dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*). Sedangkan riset evaluasi *outcomes* merupakan sebuah evaluasi yang berusaha melihat *outcomes* atau *impact* dari suatu program/kebijakan.

Henry dalam wiyato (2005:55-76) mengidentifikasi riset evaluasi ke dalam (tujuh) tipe utama, yaitu:



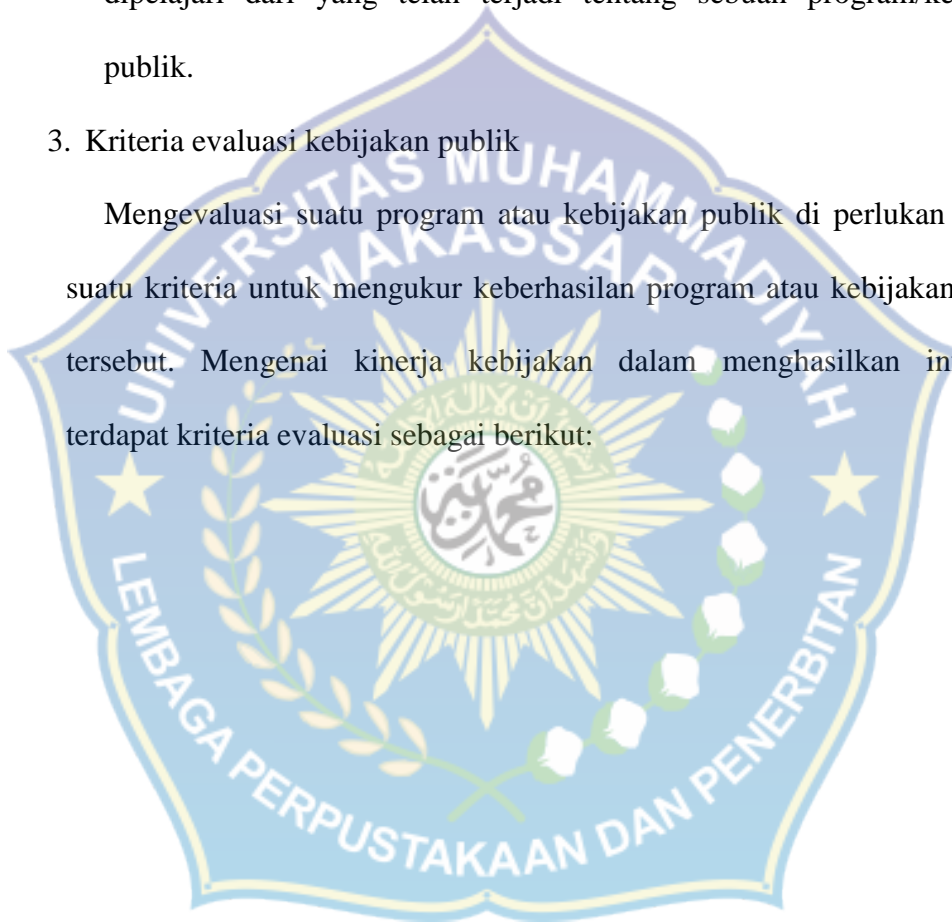
- a) *Front-end analyses* (evaluasi perencanaan program), merupakan riset evaluasi yang dikembangkan sebelum keputusan tentang sebuah program baru ditetapkan atau sebuah program dilanjutkan.
- b) *Evaluability assessment*, merupakan riset evaluasi yang dilakukan dengan jalan membandingkan asumsi kebijakan yang mendasari sebuah program tersebut, serta meniai rasionalitas asumsi yang dibuat dan kemungkinan (peluang) program dapat mencapai sasarnya.
- c) *Cost-Benefit and cost-effectiveness analyses* (riset tentang efisiensi program), merupakan tipe evaluasi yang dilakukan dengan teknik membandingkan *outputs* dan atau *outcomes* sebuah program dengan sumber daya yang telah dikeluarkan.
- d) *Proses or implementation evaluation*, merupakan riset evaluasi program dengan menilai sejauh mana sebuah program berjalan seperti yang dikehendaki (ditetapkan). Artinya, mengevaluasi suatu proses dari aktivitas yang ada dalam suatu program itu strategi yang terdapat pada riset ini, yaitu *how did the programe operate?*, atau *what happened*, atau *what the program do?*
- e) *Effectiveness, outcomes, or impact evaluation*, merupakan riset evaluasi yang ditujukan untuk menilai sejauh mana sebuah program mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan. Riset ini menfokuskan pada *output* dan *outcomes*.
- f) *Program and problem monitoring* (riset *problem monitoring*), merupakan tipe riset evaluasi yang memberikan informasi pada program dan problemnya, atau paling tidak tentang rekaman yang terjadi baik dalam

jangka pendek maupun jangka panjang di dalam sebuah variasi wilayah yang dilakukan secara simultan.

- g) *Meta-evaluation, evaluation syntheses or comprehensive evaluation*, merupakan tipe evaluasi yang menganalisis kembali temuan-temuan dari berbagai evaluasi yang telah dilakukan untuk menemukan apa yang dapat dipelajari dari yang telah terjadi tentang sebuah program/kebijakan publik.

### 3. Kriteria evaluasi kebijakan publik

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik di perlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:



<b>TIPE KRITERIA</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>ILUSTRASI</b>
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah di capai?	Unit pelayanan
Efesiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit pelayanan Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketetapan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efesiens

Sumber: Dumn, (2003:610)

Kriteria-kriteria di atas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pernyataan yang dirumuskan oleh William N. Dumn untuk setiap kriterianya. Sedangkan untuk ilustrasi dilihat dari tabel diatas pembahasannya lebih kepada metode kuantitatif. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

a) Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas disebut juga hasil guna. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

William N. Dumn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa: “Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakan tindakan. yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dumn, 2003:429)

b) Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha,

yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau lainnya.

Adapun menurut Dumn (2003:430) berpendapat bahwa: “efisiensi (*efficiency*), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan hubungan antara sinonim dan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efektivitas biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”

c) Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dumn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas masukan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang membutuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini, menurut Dumn, (2003:430-431) dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:



- 1) Masalah tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
  - 2) Masalah tipe II. Masalah dalam tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
  - 3) Masalah tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
  - 4) Masalah tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektifitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatupun.
- d) Perataan
- Perataan adalah kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik Dumn, (2003:434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*aquity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang beroriensi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil distribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efesien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari pernyataan yaitu keadilan atau kewajaran.

e) Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003:437) menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn, (2003:437) pun mengemukakan bahwa: “Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya sesuatu kebijakan”

f) Ketepatan

Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan visi dengan misi kebijakan tersebut.

Melihat dari kriteria yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tipe penelitian Willian N. Dunn sebagai bahan

dasar acuan dalam penelitian. Merujuk pada berbagai permasalahan yang telah diungkapkan pada sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti hanya akan menggunakan empat kriteria evaluasi Dumn, yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan dan responsivitas.

### **C. Konsep Jeneponto “GAMMARA”**

#### 1. Awal dikeluarkannya tagline jeneponto “GAMMARA”

Sejak malam pergantian malam tahun baru 2014, Ikhsan Iskandar yang akrab di sapa dikalangan masyarakat karaeng Ninra menghimbau bahwa tema perayaan pergantian tahun 2014 ke 2015, kabupaten Jeneponto dengan semangat “Gammara” ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jeneponto menjadi suatu “Gerakan bersama menuju jeneponto ramah”.

Berangkat dari kata “Gammara”. Gammara sendiri singkatan dari Gerakan bersama menuju jeneponto ramah, ini juga merupakan tagline yang dikeluarkan oleh pemerintah Jeneponto sebagai senjata andalan untuk menjawab persoalan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Jeneponto.

Gammara dalam bahasa makassar bermakna gagah, cantik, indah, bersih, bernilai seni dan ramah. Dengan Gammara ini merupakan tagline pemerintah kabupaten Jeneponto untuk mengubah Kabupaten Jeneponto menjadi daerah bersih, gagah atau cantik. Apalagi Gammara ini diarahkan untuk mendapatkan piala Adipura 2016, sebab sampai saat ini Jeneponto belum pernah merasakan penghargaan tertinggi di bidang kebersihan kota.

“Gammara” ini sebetulnya tagline yang patut di apresiasi, karena dengan tagline “Gammara” ini sebuah pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam menata kembali Butta Toa Turatea menjadi daerah bersih, hijau, ramah, menghilangkan imej yang selama ini melekat bahwa Jeneponto adalah daerah keras, daerah kering dan gersang dan yang sulit dibedakan antara kawasan kota dengan daerah kecamatan. Berbagai formulasi sudah dilakukan pemerintah dalam menyongsong Gammara tersebut, mulai dari penataan kawasan perkotaan, membangun taman kota, penanaman satu milyar pohon, dan agenda rutin yaitu juamat bersih yang menjadi agenda wajib setiap SKPD.

## 2. Sekilas tentang jeneponto “GAMMARA”.

Ketika pada awal tagline Gammara ini di keluarkan memang menjurus ke arah lingkungan Hidup guna untuk mencapai sebuah misi untuk menata, mengubah Kabupaten Jeneponto yang ramah, dan mendapatkan piala adipura, tetapi perkembangan selanjutnya Gammara ini tidak hanya menyangkut masalah lingkungan hidup, tetapi tagline ini meliputi atau mencakup semua aspek yang menyentuh kepada seluruh dimensi kehidupan masyarakat Jeneponto. Oleh karena itu tagline Gammara sendiri adalah singkatan, tetapi apabila kata Gammara ini di transfer masuk kedalam bahasa, diartikan sebagai cantik untuk perempuan dan gagah untuk seorang laki-laki, makanya dengan tagline yang dikeluarkan oleh pemerintah jeneponto ini, diharapkan bagaimana dengan adanya tagline Gammara ini kedepannya membawa Kabupaten Jeneponto menjadi kabupaten cantik, gagah, bersih, tertata, dan ramah.

Kemudia tagline Gammara ini juga memiliki tujuan untuk menepis dan menghilangkan anggapan selama ini bahwa jenepono orang kasar, sifat ini disebabkan pula karena kondisi alam tetapi dibalik semua anggapan itu adalah anggapan orang semata. Makannya dengan tagline ini, dapat menghilangkan anggapan orang, sehingga dengan itu masyarakat Jenepono itu masyarakatnya ramah, orang-orang yang gagah, orang-orang yang cantik, sehingga inilah yang menjadi sebab dijadikan pemerintah kabupaten Jenepono sebagai pondasi untuk mengarah ke Jenepono yang lebih baik kedepannya. Sehingga dengan adanya tagline Gammara ini, mengajak dan mengajar semua masyarakat Jenepono untuk bertingkah laku harus ramah, berfikir ramah, bersikap ramah dan semua dimensi kehidupan harus semuanya bergerak dari tagline Gammara itu sendiri.

Bukan hanya itu, tagline Gammara sendiri itu bukan hanya tagline atau slogan saja, dengan Gammara ini tidak hanya diperuntukkan ke masyarakat saja, tetapi memberikan motivasi kepada seluruh pemerintah Kabupaten Jenepono beserta jajarannya untuk menata kembali Kabupaten Jenepono menuju kota ramah, Hijau, bersih, aman, dan lebih baik lagi.

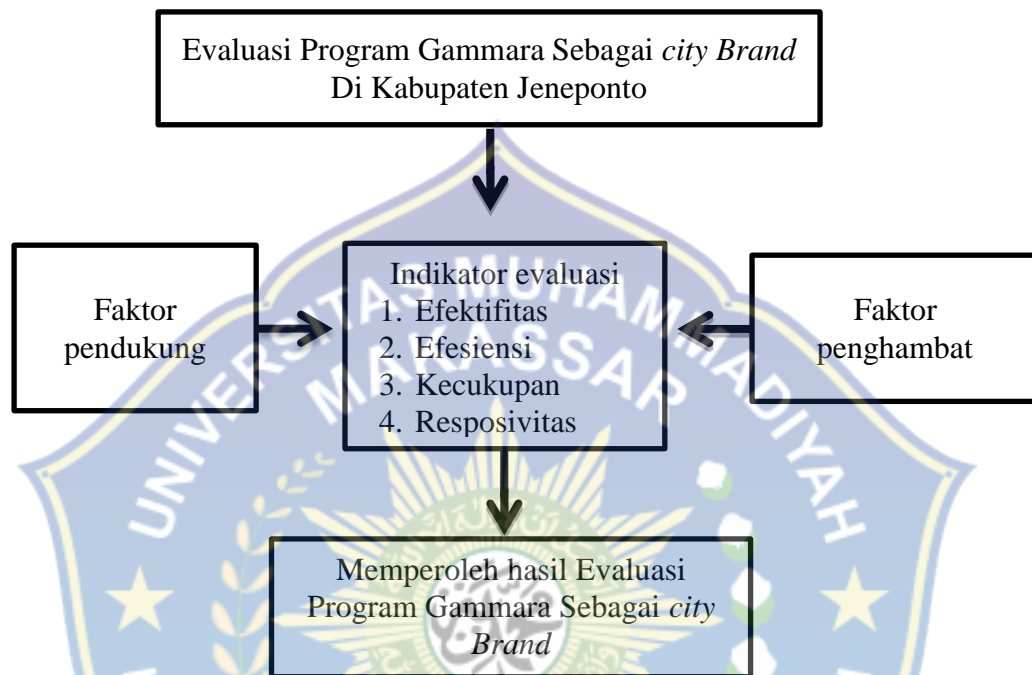
#### **D. Kerangka Pikir**

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat dilakukan penilaian terhadap program Gammara sebagai city Brand di Kabupaten Jenepono, dengan melihat indikator-indikator yang berkaitan dengan program Gammara sebagai *City Brand* di Kabupaten Jenepono. Adapun indikatornya yaitu meliputi: a) efektifitas; b) efesiensi; c) kecukupani; d) responsivitas.



Berdasarkan konsep teori diatas maka peneliti mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir ini, maka penulis menggambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

#### BAGAN KERANGKA PIKIR



#### E. Fokus Penelitian

Evaluasi program Gammara sebagai *City Brand* di Kabupaten Jeneponto meliputi beberapa fokus penelitian pada dinas lingkungan yang mencakup efektifitas, efisiensi, kecukupan dan responsivitas untuk mendapatkan penghargaan ADIPURA yang di lihat dari sisi kebersihan dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.

#### F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya secara tepat.
2. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat tertentu.

3. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
4. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.

**G. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Gammara di Kabupaten Jeneponto.**

Berdasarkan beberapa deskripsi fokus penelitian, maka dapat dilakukan penilaian terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program Gammara sebagai *City Brand* di Kabupaten Jeneponto.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dalam penulisan selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Jeneponto dengan fokus penelitian di kantor Dinas lingkungan hidup kabupaten Jeneponto.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi.

##### **2. Tipe penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe deskriptif kualitatif karena permasalahan yang kompleks serta membutuhkan pengertian makna secara mendalam, sehingga perlu dilakukan wawancara, observasi maupun dokumentasi secara mendalam agar mampu mendapat data yang valid. Dalam penelitian ini, wawancara dan observasi dilakukan di Kantor Dinas lingkungan hidup dan masyarakat Kabupaten Jeneponto itu sendiri.

### C. Sumber Data

#### 1. Data primer

Dalam penelitian ini, data primer diambil dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada kepala dinas Lingkungan hidup, staf Dinas Lingkungan hidup, pegawai Kebersihan serta masyarakat kabupaten Jeneponto itu sendiri.

#### 2. Data sekunder

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Selain data primer, peneliti juga akan mengambil data sekunder berupa keterangan masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

### D. Informan Penelitian

Penentuan narasumber (informan) dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara proposif sampling, peneliti memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti mengenai Evaluasi Program Gammara sebagai *City Brand* di Kabupaten Jeneponto. Adapun informan tersebut adalah:

1. Dinas lingkungan hidup di Kabupaten Jeneponto 7 (Orang)
2. Petugas Kebersihan di Kabupaten Jeneponto 3 (Orang)
3. Masyarakat di Kabupaten Jeneponto 3 (Orang)

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

### 1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia

### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan dengan cara mewawancarai pihak yang berkompeten dalam badan (lembaga) tersebut maupun pihak terkait lainnya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu informasi tertulis, visual atau fakta yang bisa dinyatakan dalam bentuk dokumen-dokumen dan buku. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada, hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.



Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

1. Reduksi data (*Data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian data (*Data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **G. Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono (2014), dalam pengujian pengabsahan data, metode penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

## 1. Uji *credibility*

Dalam bukunya, Sugiyono (2012) menjelaskan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti penelitian kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan data yang pernah ditemui maupun yang baru.

### b. Meningkatkan ketekunan

Melakukan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

### c. Triangulasi

Menurut William Wiersma (dalam Sugiyono, 2012) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

### d. Analisis kasus negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu.

### e. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2012).

### f. Mengadakan *memberchek*

*Memberchek* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

## 2. Pengujian *transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian yang telah didapat, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

## 3. Pengujian *dependability*

Pengujian *dependability* dalam penelitian kualitatif adalah uji *dependability* yang dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Sanafiah Faizal menyatakan bahwa jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangan” maka dependabilitas penelitiannya dapat diragukan (dalam Sugiyono, 2012).

## 4. Pengujian *confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif adalah uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menurut Sugiyono (2014: 274), ada 3 macam triangulasi yaitu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, peneliti melakukan wawancara dipagi hari disaat informan masih segar serta peneliti juga beberapa kali melakukan perbincangan (wawancara) dengan salah satu informan di malam hari yang dilakukan di rumah informan tersebut, hal ini sebenarnya informan tidak menyadari bahwa peneliti sedang melakukan wawancara karena kedatangan peneliti dianggap sebagai tamu bukan peneliti, serta peneliti juga tidak mengajukan pertanyaan ke informan akan tetapi mengarahkan informan untuk melakukan cerita panjang tentang apa yang ingin diperoleh peneliti, dengan teknik ini peneliti dapat mendapatkan data yang lebih kredibel. Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jeneponto, Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km<sup>2</sup> dan secara administrasi terbagi menjadi 11 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut hanya kurang lebih 1,20 persen dari luas wilayah administrasi Propinsi Sulawesi Selatan. Terkait luas wilayah Kabupaten Jeneponto, terdapat 4 sumber data yang berbeda. Data BPS Sulawesi Selatan (90.335 ha), Permendagri Nomor 6 tahun 2008 (70.652 ha), dan RTRW Kab. Jeneponto 2012-2013 yang berdasarkan foto citra satelit (79.953 ha) menampilkan data yang berbeda. Namun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 maka yang digunakan adalah luas wilayah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto. Untuk menyeragamkan data luas wilayah tersebut maka kedepannya diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Dalam Negeri dan bakorsurtanal.

Berdasarkan wilayah administrasi Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan sebelah Utara dengan Kabupaten Gowa dan Takalar, sebelah Selatan dengan Laut Flores, sebelah Barat dengan Kabupaten Takalar, dan sebelah Timur dengan Kabupaten Bantaeng. Wilayah bagian selatan yang berbatasan dengan Laut Flores memiliki panjang garis pantai 114 km dan sebuah pulau yang dikenal oleh masyarakat sebagai Pulau Li'bukang. Dengan panjang garis pantai 114 km maka kewenangan pengelolaan wilayah laut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32



Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat 4 adalah 114 km x 4 mil laut ke arah laut lepas.

Secara administratif Kabupaten Jeneponto terbagi atas 11 Kecamatan yang terdiri dari 31 kelurahan dan 82 desa. Kecamatan Bangkala Barat merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jeneponto yakni 152,69 km<sup>2</sup> atau 20,40% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan luas 29,91 km<sup>2</sup> atau 3,97% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto.

**Tabel : 4.1**  
**Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Jeneponto**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km)	Persentase terhadap luas wilayah kabupaten (%)
1	Bangkala	121,82	16,25
2	Bangkala Barat	152,96	20,40
3	Tamalatea	57,58	7,68
4	Bontoramba	88,30	11,78
5	Binamu	69,49	9,27
6	Turetea	53,76	7,17
7	Batang	33,04	4,41
8	Arungkeke	29,91	3,99
9	Tarowang	40,68	5,43
10	Kelara	43,95	5,86
11	Rumbia	58,30	7,78
<b>TOTAL</b>		<b>749,79</b>	<b>100,000</b>

Sumber : BPS Kab. Jeneponto 2018

## 2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu dari 24 daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak  $5^{\circ}16'13''$ – $5^{\circ}39'35''$  LS dan antara  $12^{\circ}40'19''$  – $12^{\circ}7'31''$  BT. Apabila dilihat bentang alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Jeneponto terdiri dari daerah daratan yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian utara, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kabupaten Jeneponto terletak di ujung selatan bagian barat dari wilayah provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Bontosunggu, berjarak sekitar 91 km dari Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

## 3. Topografi

Topografi di Kabupaten Jeneponto relatif bervariasi, mulai dari topografi datar (*flat*), berombak (*undulating*), bergelombang (*rolling*), berbukit (*hilly*), hingga bergunung (*mountainous*). Topografi datar-berombak (kemiringan lereng di bawah 15%) tersebar dengan luasan sekitar 42.715 ha, atau sekitar 53,68% dari luas total Kabupaten Jeneponto. Areal dengan kemiringan lereng ini adalah merupakan area persawahan, ladang, serta kebun campuran selebuhnya, area dengan kemiringan lereeng lebih dari 15% dimana sebagian besar diantaranya merupakan lahan kering

## 4. Morfologi

Morfologi Kabupaten Jeneponto ditandai oleh bentuk permukaan yang bervariasi, yakni, bagian utaranya terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter diatas permukaan laut, dibagian tengah meliputi wilayah-wilayah dataran

dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut, dan bagian selatan meliputi wilayah-wilayah daratan rendah dengan ketinggian 0 samai dengan 100 meter diatas permukaan laut.

## **5. klimatologi**

Iklim (pola distribusi dan jumlah curah hujan tahunan) Kab. Jeneponto tergolong kering di hampir semua kecamatan, selain Kec. Rumbia, Kec. Kelara dan sebagian Kec. Bangkala, yang tergolong agak basah. Kondisi iklim yang seperti ini mengindikasikan bahwa produktifitas berbagai jenis komoditas pertanian di Kabupaten Jeneponto akan menghadapi kendala kekurangan air yang ekstrim. Adapun kondisi curah hujan wilayah ini yang diwakili oleh data dari 7 stasiun pencatat hujan yaitu, Allu, Balang Loe, Jeneponto, Bissoloro, Loka< Malakaji, dan Takalar, menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan yang berkisar antara 1049-3973 mm/tahun. Keadaan musim di Kabupaten Jeneponto pada umumnya sama dengan keadaan musim di Kabupaten lain yakni terdiri dari 2 (dua) musim yaitu hujan dan kemarau, musim hujan terjadi antara Bulan November sampai dengan Bulan April, sedangkan musim kemarau terdaji pada Bulan Mei sampai dengan Bulan Oktober.

Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari stasiun pencatat hujan, maka tipe iklim Kabupaten Jeneponto dapat di klasifikasikan menjadi 2 (Dua) tipe iklim D3 dan Z4 dengan bulan kering berkisar 5-6 bulan sedangkan bulan basah berkisar 1-3 bulan. Tipe yang ke-2 (dua) adalah C2 yang memiliki Bulan basah 5-6 Bulan dan Bulan lembab 2-4 Bulan.

## 6. Demografi

Penduduk Kabupaten Jeneponto terus mengalami pertumbuhan tiap tahun. Selama priode 2008-2012 rata-rata pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,02 persen. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih besar dari pada jumlah penduduk laki-laki. Pada tahun 2012, penduduk Kabupaten Jeneponto sebesar 348.138 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 169.025 jiwa dan perempuan sebanyak 179.133 jiwa. Hal teersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel : 4.2**  
**Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2008-2012**

No	Tahun	Jumlah Penduduk			Kepadatan	Pertumbuhan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	2008	160.526	171.808	332.334	443	0,48
2	2009	161.414	172.761	334.175	446	0,55
3	2010	166.384	176.316	342.700	457	2,49
4	2011	168.056	178.090	346.149	462	1,00
5	2012	169.025	179.113	348.138	464	0,57
		<b>Rata – Rata</b>			<b>454</b>	<b>1,02</b>

Sumber: BPS Jeneponto Tahun, 2018

Sementara itu pada tahun 2017 pertumbuhan penduduk Kabupaten Jeneponto merupakan yang tinggi yaitu sebesar 2,49 persen. Hal ini terjadi karena tahun 2017 merupakan tahun pelaksanaan sensus penduduk, sehingga jumlah penduduk yang tercatat merupakan jumlah penduduk riil sebagai hasil sensus penduduk.

Kepadatan penduduk Kabupaten Jeneponto periode 20012-2018 rata-rata sebesar 454 jiwa/km. Dengan distribusi penduduk yang menunjukkan belum merata di seluruh wilayah. Berdasarkan data tahun 2018, distribusi dan kepadatan penduduk masih terkonsentrasi di Kecamatan Binamu dengan kepadatan sebesar 766 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan di Kecamatan Bangkala Barat tingkat kepadatan penduduk hanya mencapai 175 jiwa/km. Hasil Analisa distribusi dan kepadatan penduduk di Kabupaten Jeneponto disajikan pada tabel berikut:

**Tabel: 4.3**  
**Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2018**

NO	Kecamatan	Luas (km)	Penduduk	Kepadatan	Anggota
1	Bangkala	121,82	50,650	416	4
2	Bangkala Barat	152,96	26,758	175	4
3	Tamalatea	57,58	40,991	712	4
4	Bontoramba	88,3	35,530	402	4
5	Binamu	69,49	53,252	766	5
6	Turatea	53,76	30,394	565	4
7	Batang	33,04	19,496	590	5
8	Arungkeke	29,91	18,522	619	4
9	Taroang	40,68	22,692	558	4
10	Kelara	43,95	26,860	611	4
11	Rumbia	58,3	22,993	394	4
Jeneponto		749,79	348,135	464	4

Sumber: BPS Kab. Jeneponto, 2018



Dengan asusi ini, maka distribusi penduduk di wilayah Kabupaten Jeneponto bervariasi, hal ini disebabkan karena tidak semua Kecamatan mempunyai jumlah penduduk dan luas yang sama. Dimana makin kecil luas lahan kecamatan maka tingkat kepadatan penduduknya cenderung lebih tinggi, apalagi kecamatan yang bersangkutan mempunyai jumlah penduduk yang besar.

Berkaitan dengan agama yang berada di Kabupaten Jeneponto, mayoritas memeluk agama islam, disusul oleh Proestan dan Katholik (lihat gambar tabel 2.5). Kecamatan Binamu merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk selain islam terbanyak. Dengan kondisi ini maka Kecamatan Binamu memiliki potensi untuk terjadinya gesekan antara umat beragama. Perlindungan terhadap pemeluk agama lain sangat penting untuk memberi jaminan bagi mereka melaksanakan keyalinannya.



**Tabel: 4.4**  
**Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Kabupaten Jeneponto Tahun 2018**

No	Kecamatan	Tahun				
		Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha
1	Tamalatea	40,754	6	4	-	-
2	Bontoramba	34,986	-	-	-	-
3	Binamu	51,791	71	9	2	-
4	Turatea	29,179	-	-	-	-
5	Kelara	26,695	-	-	-	-
6	Rumbia	18,687	-	-	-	-
7	Arungkeke	18,954	-	-	-	-
8	Batang	19,501	-	-	-	-
9	Tarawang	22,492	-	-	-	-
		263.003	94	13	2	0

Sumber: BPS Kab. Jeneponto, 2018



## **7. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup**

Visi dinas lingkungan hidup adalah mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas, profesional, partisipatif dan berkelanjutan menuju Jeneponto Gammara. Sedangkan misi dari dinas lingkungan hidup di bagi menjadi 6 yaitu: a) peningkatan pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan; b) peningkatan keselarasan keserasian antara aktivitas pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; c) penguatan kapasitas, data dan kelembagaan lingkungan hidup; d) penguatan peran serta masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia yang handal dan profesional dibidang lingkungan hidup; e) mewujudkan penataan dan penegakan hukum lingkungan; f) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan data serta penyediaan informasi lingkungan.

## **8. Sekilas tentang Jeneponto Gammara**

Ketika pada awal tegline GAMMARA ini dikeluarkan memang menjurus kearah lingkungan hidup guna untuk menata kembali Kabupaten Jeneponto yang ramah da mendapatkan piala adipura, tetapi perkembangan selanjutnya GAMMARA ini tidak hanya menyangkut masalah lingkungan hidup, tetapi tagline ini meliputi atau mencangkup semua aspek yang menyentuh kepada seluruh dimensi kehidupan masyarakat Jeneponto. Oleh karena itu, tagline GAMMARA ini kedepanya membawa Kabupaten Jeneponto menjadi kabupaten cantik, gagah, bersih, tertata dan ramah.

### 9. Tujuan di bentuknya tagline “Gammara”

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dibentuknya tagline Jeneponto Gammara antara lain yaitu : a) Untuk meraih piala Adipura tahun 2016, sebab sampai saat ini kabupaten Jeneponto merasakan penghargaan tertinggi di bidang kebersihan; b) Untuk menata kembali Kabupaten Jeneponto menjadi daerah bersih, hijau, ramah. Menghilangkan imej yang selama ini melekat bahwa Jeneponto adalah daerah keras, daerah kering dan gersang dan daerah yang sulit dibedakan antara kawasan perkotaan dengan daerah kecamatan.

### 10. Karakteristik informan

Karakteristik akan dipaparkan berdasarkan jenis kelamin, umu, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.

#### a. Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel: 4.5 . karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin

Keterangan	Frekuensi
Laki-Laki	11
Perempuan	2
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>

Sumber : *diolah dari data primer*, September 2018



Distributor informan mengenai jenis kelamin berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa 11 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari keseluruhan jumlah informan.

b. Karakteristik informan berdasarkan umur

Tabel 4.6 : karakteristik informan berdasarkan umur

Keterangan	Frekuensi
21-30	0
31-40	6
41-50	4
51-60	3
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>

Sumber: *diolah dari data primer*, Mei 2018

Distributor informan mengenai umur, berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa kebanyakan informan memiliki umur yang kisaran 31-40 tahun yaitu sebanyak 6 orang informan sedangkan informan yang memiliki umur 51-60 sebanyak 3 orang informan.

c. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 : Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Frekuensi
S2	3
S1	3
SMA	3
SMP	3
SD	1
<b>Jumlah</b>	

Sumber: *diolah dari data primer*, Mei 2018

Distribusi informan mengenai tingkat pendidikan berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa 3 orang yang berpendidikan S2, informan yang berpendidikan S1 sebanyak 3 orang, serta informan yang berpendidikan SMA sebanyak 3 orang dan informan yang berpendidikan SMP sebanyak 3 orang dan informan yang berpendidikan SD sebanyak 1 orang dari keseluruhan informan.

d. Karakteristik informan berdasarkan pekerjaan

Karakteristik informan berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8 : karakteristik informan berdasarkan pekerjaan

Keterangan	Frekuensi
ASN	7
Personil kebersihan	3
Wiraswasta	2
Petani	1
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>

Sumber: *diolah dari data primer*, Mei 2018

Distribusi informan mengenai pekerjaan berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa bahwa 7 orang berprofesi sebagai ASN, 3 orang berprofesi sebagai personil kebersihan, 2 orang berprofesi sebagai wiraswasta dan 1 orang berprofesi sebagai petani.

#### 11. Fasilitas yang dimiliki

Fasilitas yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup sebagai salah satu pelaksana tagline Jeneponto Gammara di bidang kebersihan.

**Tabel: 4.9**  
**Fasilitas yang dimiliki dinas lingkungan hidup**

No	Nama kendaraan	Jumlah satuan	Kapasitas	Satuan (m <sup>3</sup> atau ton)	Ritasi	Jumlah beroperasi	Jumlah rusak
1	Gerobak sampah	13	1.00	m <sup>3</sup>	1	9	4
2	Gerobak motor sampah	27	2.00	m <sup>3</sup>	2	9	18
3	Truk terbuka	1	4.00	m <sup>3</sup>	2	0	Rusak
4	Truck compactor						
5	Dump truck	4	6.00	m <sup>3</sup>	2	4	Baik
6	Arm roll	3	5.00	m <sup>3</sup>	2	2	1
7	Trailer container	25	55.00	m <sup>3</sup>	1	19	6
<b>Jumlah</b>		<b>73</b>	<b>73.00T</b>		<b>10</b>	<b>43</b>	<b>29</b>

Sumber : diolah dari data dinas lingkungan hidup 2018

Sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan fasilitas pengangkut sampah berjumlah 73 unit dan 73 unit ini mempunyai kapasitas mengangkut sampah sebesar 73.00 ton, adapun fasilitas yang rusak berjumlah 29 unit.

#### **B. Evaluasi Program “Gammara” Sebagai *city brand* di Kabupaten Jeneponto.**

Program Gammara sebagai *city brand* di Kabupaten Jeneponto merupakan tagline yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk mewujudkan

Kabupaten Jeneponto menjadi daerah bersih, hijau, ramah. Menghilangkan imej yang selama ini melekat bahwa Jeneponto adalah daerah keras, daerah kering dan gersang, dan untuk mewujudkan terselenggaranya tagline tersebut, hampir semua Dinas di Kabupaten Jeneponto membuat program-program untuk mensukseskan tagline Gammara tersebut. Namun dalam pembahasan ini lebih berfokus pada evaluasi program-program yang buat oleh dinas lingkungan hidup untuk mensukseskan tagline Gammara tersebut.

Adapun program-program yang dikeluarkan dinas lingkungan hidup untuk mendukung tercapainya tagline Jeneponto Gammara diantaranya: a) penanaman pohon dan bibit peneduh dan bibit produktif; b) pengadaan sarana dan prasarana; c) sosialisasi tentang pengelolaan sampah; d) membuat program kampung iklim; e) bank sampah pada sekolah MTS, SMP, dan SMA.

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program-program dinas lingkungan hidup dalam mensukseskan tagline Gammara di Kabupaten Jeneponto dapat kita lihat melalui 4 indikator yaitu: a) Efektifitas; b)efisiensi; c)kecukupan; d)resposivitas.

### **1. Efektifitas**

Efektifitas adalah salah satu faktor yang diinginkan oleh dinas lingkungan hidup untuk membuat program-program dalam mensukseskan tagline Jeneponto Gammara. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan bapak selaku kepala Dinas lingkungan hidup. Berikut hasil wawancara menyatakan bahwa:

“saya kira kalo masalah program-program yang dikeluarkan oleh dinas lingkungan hidup untuk mensukseskan Jeneponto gammara, saya kira kita



di dinas lingkungan hidup sudah bekerja semaksimal mungkin namun karna anggaran yang masih minim sehingga kami hanya bisa menjalankan program sesuai dengan anggaran yang ada, sehingga belum terlalu efektif kalau misalkan mau di persenkan kira-kira tingkat pencapaiannya itu baru sekitar 60 %. Karna selain dari faktor iklim yang kering sehingga program di luncurkan oleh dinas lingkungan hidup belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan terutama pada program penanaman pohon dan bibit peneduh dan bibit produktif". (S. 15 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa program-program yang dikeluarkan oleh dinas lingkungan hidup terkait dengan masalah efektifnya dapat memberikan gambaran bahwa dinas lingkungan hidup sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan tagline Gammara namun anggaran di berikan oleh pemerintah daerah ke dinas lingkungan hidup masih sangat minim.

Adapun hasil wawancara dengan bapak selaku sekretaris Dinas lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

“kalau masalah efektif atau tidaknya program yang kami keluarkan, sebenarnya sebelum kami membuat program kami disini sudah mempertimbangkan efektif atau tidaknya namun untuk pelaksanaannya yaa tentu kami juga berharap dari anggaran yang diberikan kepada kami disini karna berjalan atau tidaknya program tergantung dari seberapa banyak anggaran yang diberikan, karna pengadaan sarana dan prasarana juga membutuhkan biaya tidak sedikit. (H.D 15 Juli 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa program-program yang di buat oleh dinas lingkungan hidup mencerminkan bahwa dinas lingkungan hidup sangat mendukung tagline Gammara yang dibuat oleh pemerintah namun dinas lingkungan hidup masih terkendala dimasalah pendanaan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak selaku kepala seksi limbah di dinas lingkungan hidup yang menyatakan bahwa

“Kalau menurut saya pribadi program yang ada pada Dinas lingkungan hidup sudah cukup efektif. Karena kami rutin mengadakan sosialisasi pada masyarakat terkait dengan program yang dibuat oleh dinas lingkungan hidup. kebetulan saya dipercayakan oleh pak kadis menjadi kepala seksi limbah B3 jadi saya rutin mengadakan sosialisasi masalah mekanisme dan tata cara pengumpulan limbah berbahaya dan beracun (B3). Agar masyarakat tau bagaimana membedakan limbah yang berbahaya dan yang mana limbah yang mengandung racun dan bagaimana cara untuk mengatasinya”. (M.B, 17 Juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa bukan hanya kepala dinas yang bekerja keras untuk mensukseskan tagline Jeneponto Gammara tapi berkat kerja sama antara kepala bidang dan kepala seksi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat dapat membedakan mana yang memang bagian dari pekerjaan dinas lingkungan dan mana yang kewajiban masyarakat dalam mensukseskan program Gammara tersebut.

Berkaitan dengan efektifitas program kerja dinas lingkungan hidup dalam mensukseskan tagline Gammara, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat selaku yang merasakan program tersebut, berikut hasil wawancaranya:

“Kalo menurutku program gammara ini lebih mantap karna secara tidak langsung yang dulunya sampah itu hanya di buang begitu saja tapi karna adanya program Gammara yang dikeluarkan Kr.ningra’ maka sebagian masyarakat sekarang sudah mengelola sebagian sampah itu menjadi penghasilannyaseperti membuat bunga hias dan pot bunga dan lain-lain”(D.L.W.17 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat kita simpulkan bahwa program Gammara ini cukup membantu masyarakat karna secara tidak langsung dengan adanya prtogram tersebut masyarakat dapat lebih membuka peluang untuk membuat kreatifitasnya dari hasil menjaga lingkungannya sendiri.

## **2. Efisiensi**

Efisiensi adalah salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto sebelum membuat suatu program yang akan mendukung terwujudnya tagline Jeneponto Gammara, khususnya pada pihak dinas lingkungan hidup karena dinas lingkungan hidup sangat berperan penting untuk mensukseskan tagline Gammara tersebut.

Berkaitan dengan efisiensi program kerja dinas lingkungan hidup dalam mensukseskan tagline Gammara, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan kepalaseksi penanganan sampah, berikut hasil wawancaranya:

“Jadi kita disini dalam program gammara itu dari apa yang telah di jalankan dinas lingkungan hidup terutama pada bidang pengelolaan sampah melakukan sosialisai pengelolaan sampah tentang pengelolaan daur ulang kemudian memberikan program kelestarian pada fungsi lingkungan misalkan pembuatan embum dan pembuatan lubang cerdas bioforit untuk penanganan sampah organik dan pemeliharaan mata air.(A.R. 22 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat kita simpulkan bahwa program gammara itu sangat efektif adanya untuk masyarakat jeneponto, tapi sebagian masyarakat jeneponto masi kurang peduli dengan program dinas lingkungan dalam mensukseskan program Gammara ini.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak selaku kepala seksi pengurangan sampah, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi salah satu upaya yang kita lakukan disini yaitu pengurangan sampah, pengurangan maksudnya itu ialah mengurangi pemakaian yang bisa menghasilkan sampah, kalau ada yang bisa menghasilkan sampah kami meminta masyarakat untuk mendaur ulang sampahnya, misalkan seperti sampah bekas minuman kayak teh gelas atau sejenisnya, agar masyarakat mendaur ulang menjadi keranjang agar kalau kepasar tidak menggunakan lagi kantong plastik. Makanya sekarang itu lewat indomart ada namanya program plastik berbayar itu tujuannya untuk mengurangi pemakaian sampah plastik, karna kalau tidak dikasi begitu masyarakat seandainya meminta kantong tapi kan kalau diberikan aturan seperti itu masyarakat berpikir untuk dua kali untuk memakai kantong plastik”. (A.R. 22 JULI 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa dinas lingkungan hidup sudah melakukan berbagai terobosan-terobosan untuk mengurangi pemakaian sampah plastik tujuannya agar bagaimana tagline Gammara di kabupaten jenep[onto ini bisa tercapai.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak selaku masyarakat Kabupaten Jeneponto, berikut hasil wawancaranya :

“Program gammara ini sangat baik bagi saya yang seorang petani karna dari sosialisasi yang diadakan dari dinas lingkungan saya banyak mendapatkan pembinaan dari dalam pengelolaan sampah yang bisa saya jual kembali atau jadi hiasan untuk saya simpan dirumah saya”(D.L 23 Juli 2019)

Senada dengan hasil wawancara diatas juga di ungkap oleh salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja di bengkel di jalan kelara yang berada di sekitar pastur

“Saya juga memang kadang-kadang memanfaatkan kaleng atau botol-botol yang sudah tidak terpakai lagi, dari pada menjadi sampah yang merusak pemandangan di kota Jenepono mending saya fungsikan menjadi hiasan di pekarangan rumah saya sesuai arahan dari Dinas Lingkungan. (N. 24 Juli 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat memberikan gambaran bahwa sebenarnya masyarakat juga memberikan respon positif terhadap program yang digagas oleh dinas lingkungan hidup, dan apabila program ini terus dikawal dengan baik oleh dinas terkait lambat laun akan banyak lagi masyarakat yang akan memberikan respon positif seperti respon yang diberikan oleh responden yang diwawancarai oleh peneliti.

### **3. Kecukupan**

Terkait dengan kecukupan, kecukupan memang harus selalu menjadi perhatian oleh pemerintah Kabupaten Jenepono khususnya pada pihak dinas lingkungan hidup, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan bapak selaku kepala badan pengelolaan sampah dan limbah B3, berikut hasil wawancaranya:

“dulu itu sebelum di ada tagline Gammara, kita bisa melihat sendiri seperti apa keadaan Kabupaten Jenepono, mulai dari sampahnya ditambah lagi dengan daerahnya yang gersang. Tapi semenjak tagline gammara muncul kita juga telah membuat program-program yang mendukung tagline Gammara ini salah satunya yaitu kita telah membuat bank sampah di beberapa sekolah, meskipun belum maksimal tapi setidaknya itu sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat”.(A.R 16 Juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat memberikan gambaran bahwa program-program yang dibuat oleh dinas lingkungan hidup sudah memberikan manfaat dan nilai edukasi bagi siswa-siswa yang sekolahnya ada bank sampahnya, namun



program ini juga belum maksimal karna baru ada beberapa sekolah yang menerapkan bank sampah ini, artinya belum menyeluruh ke semua sekolah yang adadikabupaten Jeneponto. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak selaku kabitid pengelolaan sampah dan limbah B3.

“untuk saat ini kami sangat berfokus di masalah pengawasan limbah B3, terutama dibengkel-bengkel karna menghasilkan limbah oli bekas, dan saya juga mengawasi tambag udang di bulo-bulo dan juga limbah medis seperti di puskesmas, rumah sakit dan rumah bersalin”. (D.L 23 Juli 2019).

Dari pernyataan diatas dapat memberikan gambaran bahwa dinas lingkungan hidup taidak hanya berfokus pada kebersihan saja namun limbah B3 juga menjadi salah satu titik fokus dinas lingkungan hidup.

#### **4. Responsivitas**

Responsivitas merupakan salah satu yang harus dimiliki oleh dinas lingkungan hidup untuk mewujudkan tagline Jeneponto Gammara, berdasarkan hal tersebut maka peneliti memilih 2 sub indikator sebagai tolak ukur, sejauh mana respon dinas lingkungan hidup dalam menjalankan program-programnya untuk mewujudkan jeneponto gammara, berikut sub indikatornya: a) kecepatan; b) tepat waktu.

##### **a. Kecepatan**

Kecepatan adalah salah satu sub bagian dari indikator responsivitas yaitu untuk melihat sejauh mana respon dinas lingkungan hidup ketika ada laporan dari masyarakat berkaitan dengan program mereka. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan bapak selaku kepala seksi penataan dan pemeliharaan, berikut hasil wawancaranya menyatakan bahwa:

“Begini dek, pengalaman saya semenjak saya menjabat disini jarang-jarang itu ada masyarakat yang melapor, jadi kami disini harus mencari tau sendiri contohnya kalau ada taman yang rusak kita langsung yang cek, dan setelah itu kita perintahkan tim untuk menata kembali kalau ada taman yang rusak, kayak sampah kan kita sudah ada petugas yang bekerja kita tinggal mengawasi mereka apakah dia bekerjasesuai dengan SOP atau tidak”.(K.M 23 Juli 2019).

Berdasarkan pernyataan responden diatas terkait masalah kecepatan dapat memberikan gambaran bahwa dinas lingkungan hidup tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan program-programnya agar jeneponto Gammara ini bisa terwujud.

Adapun hasil wawancara dengan ibu selaku petugas kebersihan, berikut hasil wawancaranya :

“Kalau masalah kecepatan kita disinikan bekerja sesuai sip, kalau saya kebetulan kerja sore-sore menyapu di jalan, kalau misalkan banyak sampah kita juga lama menyapunya kalau sedikitkita juga cepat selessai jadi tergantung banyak dan sedikitnya sampah, kitakan juga tidak bisa terburu-buru dalam bekerja jangan sampai cepat selesai tapi tidak terlalu bersih”. (B. 28 Juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat kitalihat bahwa dinas lingkungan hidup sudah menentukan jadwal bekerja untuk petugas kebersihan sehingga sampah-sampah yang ada dikabupaten Jeneponto khususnya di wilayah perkotaan bisa ditangani dengan baik.

#### b. Tepat waktu

Tepat waktu merupakan hal pokok yang harus dicapai oleh dinas lingkungan hidup dalam menjalankan program-programnya. Oleh karena itu peneliti melakukan

wawancaradengan bapak selaku kepala dinas lingkungan hidup dikabupaten Jeneponto, berikut hasil wawancaranya:

“Sebetulnya tagline Gammara ini sudah terbentuk sejak beberapa tahun yang lalu dan sejak itu pula program-program di dinas lingkungan hidup kita buat guna untuk mewujudkan tagline tersebut, kan targetnya kemarin sehingga dibuat ini tagline Jeneponto Gammara yaitu untuk meraih piala Adipura pada tahun 2016, dan sekarang ini sudah tahun 2019 itu artinya kita gagal untuk mendapatkan Adipura tersebut, namun bukan berarti program-program yang kita buatpun harus di stop, justru itu menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih ekstra sehingga suatu saat nanti apa yang diharapkan dapat terwujud”.(S. 15 Juli 2019)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat memberikan gambaran bahwa program-program yang dibuat oleh dinas lingkungan hidup sudah beberapa tahun lalu dibuat namun belum sesuai dengan harapan, namun dinas lingkungan hidup tetap optimis menjalankan program-programnya sampai sekarang.

Dalam hal mengenai tepat waktu adalah hal pokok untuk memberikan kepastian bagi siapa saja yang dilayani, khususnya pelayanan dibidang kebersihan, berikut hasil wawancara dengan bapak selaku petugas kebersihan:

“kalau masalah tepat waktu itu sudah jelas pasti kami harus tepat waktu berada di lokasi untuk menyapu jalanan, kalau misalkan saya bekerja di pagi, terus saya terlambat kan saya kerepotan menyapunya karna sudah banyak kendaraan yang lewat-lewat jadi harus datang sebelum matahari terbit”. (I. 28 Juli 2019).

Senada dengan pernyataan diatas juga diungkap oleh salah seorang sopir mobil kebersihan, berikut pernyataanya:

“iya dek, pekerjaan kita disini memang menuntut kita untuk selalu tepat waktu, karna kalau tidak bisa jadi sampah-sampah berserakan kalau lama

baru diangkut, kan kalau terlambatka juga datang mengangu juga pengendara lain karna mobil pengangkut sampah setiap ada tempat sampah berhenti lagi dan itu bisa menganggu pengendara lain”(S. 28 Juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas kita dapat melihat bahwa personil kebersihan sudah bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang diberlakukan oleh dinas lingkungan hidup. Kemudia peneliti kembali malakukan wawancara dendan salah satu masyarakat Jeneponto. Berikut hasil wawancaranya:

“ kadang-kadang juga ada itu petugas kebersihan yang kesianga untuk membersihkan sehingga kalau lewatki didekatnya berdebuki, tapi semua juga begitu adaji juga yang rajindatang tawwa”(N. 28 Juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu masyarakat dapat di lihat bahwa meskipun ada beberapa petugas kebersihan yang mematuhi SOP yang telah diberikan oleh dinas lingkungan hidup namun masih ada yang menyalahi SOP tersebut.

### **C. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program GAMMARA pada dinas lingkungan hidup di Kabupaten Jeneponto.**

Dalam upaya pelaksanaan program-program dinas lingkungan hidup dalam rangka mendukung tercapainya program gammara di Kabupaten Jeneponto sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa pelaksanaan program kerja dinas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan tagline gammara tentunya dipengaruhi beberapa faktor yaitu sebagai berikut

## 1. Faktor Pendukung

Dalam menjalankan program-program dinas lingkungan hidup ada beberapa faktor-faktor pendukung sehingga program-programnya dapat terlaksana. Yaitu sebagai berikut:

### a) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia juga sangat berperang penting karna terlaksana atau tidaknya sebuah program tergantung dari sumber daya manusianya sendiri. Oleh karena itu peneliti kemudian melakukan wawancara dengan kepala dinas lingkungan hidup, berikut pernyataanya:

“salah satu faktor pendukungnya itu adalah Sumber daya manusianya sudah bisa dikatakan cukup baik dalam bekerja, hal itu dapat dilihat dari seberapa sering teman-teman terjung kelapangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program-program yang telah kami buat”(S.15 Juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menjadi faktor penkung dari program yang buiat oleh dinas lingkungan hidup adalah sumber daya manusia ynag dimiliki oleh dinas lingkungan hidup. Kemudian peneliti kembali melakukan wawancara dengan salah seorang masyarakat kabupaten Jeneponto.

“memang betul bahwa pegawai di dinas lingkungan hidup sering kesini mengadakan sosialisasi, mulai dari sosialisasi sampah sampai sosialisasi masalah limbah”. (L. 29 Juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa memang betul bahwa pegawai pada dinas lingkunga hidup terjung langsung kemasarakat untuk memberikan arahan kepada masyarakat.



b) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang terselenggaranya sebuah program-program yang dibuat, oleh sebab itu peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris dinas lingkungan hidup, berikut hasil wawancaranya:

“Kalau berbicara mengenai faktor pendukungnya saya rasa yang menjadi faktor pendukungnya itu adalah sarana dan prasarana karna kayak kendaraan pengangkut sampah itu sudah ada beberapa jenis yang di sediakan oleh pemda, seperti trailer container, mempunyai sebanyak 25 unit kendaraan dan saya rasa itu lebih dari cukup untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di kabupaten jeneponto, meskipun jeneponto itu luas tapi kan penduduknya tidak terlalu padatji seperti dimakassar, maka otomatis sampah yang dihasilkan pun tidak seperti banyaknya sampah yang dihasilkan oleh penduduk dimakassar”.(HD. 30 juli 2019)

Terkait dengan sarana dan prasarana, mengenai hasil wawancara diatas maka dapat kita simpulkan bahwa salah satu yang menjadi faktor pendukung dari program yang dikeluarkan oleh dinas lingkungan hidup yaitu sarana dan prasarananya yang cukup memadai.

## 2. Faktor Penghambat

Dalam upaya pelaksanaan program-program dinas lingkungan hidup dalam rangka mendukung tercapainya program gammara di Kabupaten Jeneponto sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa pelaksanaan program kerja dinas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan tagline gammara tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, berikut faktor yang menjadi hambatannya:

a) Komitmen pemerintah daerah

Komitmen pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendorong terlaksananya setiap program untuk mensukseskan program Gammara oleh sebab itu peneliti melakukan wawancara dengan kasi. Penataan dan pemeliharaan dinas lingkungan hidup, berikut hasil wawancaranya:

“Untuk pemerintahan jenepono di bawah kepemimpinan bapak bupati sendiri masi banyak komitmen yang dia kurang pertahankan dan masih harus ditingkatkan mengingat masi banyaknya yang harus di benahi di kabupaten jeneponto dan bukan hanya program Gammara ini saja maka dari itu kadang sebagian program terpaksa ditunda di dinas lingkungan ini tp seddikit demi sedikit pasti akan ada perubahan untuk mendapatkan penghargaan adipura”.(AN. 31 juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa jeneponto saat ini memang sedang banyaak melakukan pembenahan pada wilayahnya yang akan dapat dinikmati masyarakat yang ada di Jeneponto maka komitmen untuk menjadikan program andalannya jeneponto yaitu Gammara masi kurang untuk di perhatikan oleh pemerintahan jeneponto sendiri. Kemudian peneliti kembali melakukan wawancara dengan salah seorang masyarakat kabupaten Jeneponto.

”memang kalo dari pemerintah sendiri seperti masi kurang kerjanya dalam mesuksesan program Gammara ini, apa lagi di sekitar kota saja masi ada yang terlihat sampah apalagi yang tidak berada di daerah perkotaan seperti yang ada di kec. Batang apa lagi di tarawang yang masi banyak sampah berserakan di pinggir jalan”. (NH. 1 Agustus 2019).

Dair hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa memang kinerja petugas pengangkut sampah hanya mengangkut sampah pada bagian yang memang sangat padak penduduknya apa lagi petugas pengangkut sampah hanya mengikuti

intruksi dari kepala dinas lingkungan hidup hal itu dapat kita perhatikan dari kurangnya truk pengangkut sampah dan gerobak sampah yang disediakan oleh dinas lingkungan jadi hal ini memicu makin banyaknya masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya.

b) Kondisi geografis

Letak geografi juga sangat berpengaruh untuk mensukseskan program Gammara ini. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan Kasi. Pengurangan Sampah, berikut hasil wawancaranya :

“Saya kira program itu memang masi belum terealisasi dengan baik karna adanya hambatan pada kondisi geografis di jenepono karna kita adalah kabupaten yang tingkat musim kemaraunya agak lebih panjang dari pada musim hujan jadi mungkin itu bagian yang menjadi kendala program Jenepono Gammara itu terhambat misalkan penanaman pohon jadi pemeliharaannya agak terlambat dari sisi musim hujan yang kurang intensitasnya”.(A.R 5 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa memang geografis yang ada di jenepono untuk saat ini masih belum mendukung untuk terlaksananya tujuan dari program Gammara itu sendiri yaitu mendapatkan penghargaan adipura.

C) Penegakan Pemda

Penegakan pemda juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong terlaksananya program Gammara oleh sebab itu peneliti melakukan wawancara dengan kasi. Pengurangan sampah, berikut hasil wawancaranya :

”sekarang masi banyak ternak yang masi berkeliaran di poros Jenepono dan itu juga yang menjadi hambatan dalam menjalankan Program Gammara”(A.R 5 Agustus )

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan mulai dari penegakan pemda yang memang masi kurang tegas pada masyarakat yang masi sering melanggar aturan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang saya laksanakan dapat kita tarik kesimpulan bahwa:

1. Evaluasi pelaksanaan program *Gammara* di Kabupaten Jeneponto
  - a. **Efektifitas** : Belum dikatakan efektif dari segi anggaran yang masih minim sehingga pelaksanaan program tidak sesuai dengan anggaran yang ada, saat ini tingkat pencapaiannya itu baru sekitar 60 %. Dan program penanaman pohon bibit peneduh dan bibit produktif belum sesuai harapan. Kemudian iklim yang tak menentu.
  - b. **Efesiensi**: Usaha yang dilaksanakan dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Jeneponto sudah cukup memuaskan, pada pelaksanaan sosialisai pengelolaan sampah tentang pengelolaan daur ulang kemudian memberikan program kelestarian pada fungsi lingkungan misalkan pembuatan embun dan pembuatan lubang cerdas bioforit untuk penanganan sampah organik dan pemeliharaan mata air itu sudah cukup meberikan dampak baik dalam pengelolaan sampah yang bermanfaat.
  - c. **Kecukupan** : Telah memenuhi pencapaiannya hal itu dapat dilihat dari adanya bank sampah di beberapa sekolah yang saat ini mulai di fungsikan oleh para siswa dan pengawasan limbah B3 pada bengkel,



tambang udang dan juga limbah medis yang telah mulai dirasakan manfaatnya bagi masyarakat

d. **Responsivitas** : sudah cukup memuaskan itu dapat dilihat dari kecepatan dinas lingkungan dalam menata setiap taman yang ada di Kabupaten Jeneponto dan secara langsung memerintahkan petugas kebersihan untuk menjalankan tugasnya tanpa menunggu keluhan dari masyarakat

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program *Gammara* di Kabupaten Jeneponto

a. **Pendukung:**

(1) Sumber daya manusia yang sudah bisa dikatakan cukup baik dalam kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang langsung terjun kelapangan melakukan sosialisasi masalah sampah dan limbah pada masyarakat.

(2) Sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai untuk menangani sampah yang tidak terlalu banyak di Kab Jeneponto

**Penghambat:**

(1) Komitmen pemerintah Daerah

Masih banyaknya yang harus dibenahi di Jeneponto sehingga pelaksanaan program *Gammara* ini terhambat apa lagi masih ada masyarakat yang membuang sampah di sekitar Kota Jeneponto

## (2) Kondosi Geografis

Tidak terealisasi dengan baik program gammara dikarenakan musim kemaraunya yang lebih lama dari pada musim hujan sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman bibit peneduh dan produktif di Kabupaten Jeneponto

## (3) Penegakan Pemda

Dikarnakan masi banyaknya Ternak yang masi berkeliaran di poros jalan Kabupaten Jeneponto

### **B. Saran-Saran**

1. Agar kedepannya program gammara ini lebih mendapatkan perhatian oleh pemerintahan di Jeneponto agar penanganan sampahnya dapat merata di sepanjang jalan di Jeneponto
2. Memfokuskan pada penanaman pohon yang sesuai dengan kondisi geografis di Kabupaten Jeneponto
3. Aparat desa dan segenap pemerintahan yang ada di Jeneponto harus lebih memperhatikan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungannya

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Hasrat, dkk. 2014. *Pedoman penulisan proposal dan skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Bogdam dan Taylor. 2001. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rosda
- Duun, william N. 2003 *pengantar Analisis kebijakan publik (edisi kedua)*, Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Dunn, N. William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Gunawan, Putu Nova, “*Makassar Smart City 2030*”, tahun 2013, (jurnal lingkungan, fakultas teknik, Universitas Hasanuddin)
- Jusman, Mahmud, *sinergitas Kebijakan program “makassar ta’ tidak rantasa” di kota Makassar*, tahun 2016 (tesisi program pascasarjana, universitas Hasaniuddin)
- Kencana Syafiie, Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta,Rineka Cipta, 2002.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2011, *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- 2003, *kebijakan publik: formulasi, implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, Eko Budi. 2012. *Buku Ajar Studi Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung
- Suharno, 2013 *dasar-dasar kebijakan publik: kajian proses dan analisis kebijakan*. Yogyakarta: penerbit Ombak.
- Undang-undang PEMDA UU RI No.23 Tahun 2014, *tentang pemerintahan daerah*
- Winarno, Budi 2005. *Teori dan proses kebijakan publik: Yogyakarta: Media press*

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1533/FSP/A.1-VIII/VI/1440 H/2019 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Alwi  
Stambuk : 10564 01636 12  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto  
Judul Skripsi : " Evaluasi Program "Gammara" sebagai City Brand di Kota Jeneponto"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

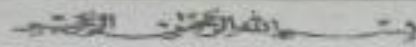
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 01 Juli 2019

Dekan,  
Ub. Wakil Dekan I

**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**  
NBM : 1084 366





Nomor : 2251/05/C.4-VIII/VII/37/2019

30 Syawal 1440 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

03 July 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

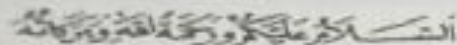
Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1533/FSP/A.6-VIII/VII/1440 H/2019 M tanggal 1 Juli 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ALWI

No. Stambuk : 10564 01636 12

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

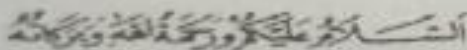
Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Evaluasi Program "Gambara" sebagai City Brand di Kota Jeneponto"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 Juli 2019 s/d 6 September 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.



Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 18995/S.01/PTSP/2019  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Bupati Jeneponto

di-  
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2251/05/C.4-VIII/VII/37/2019 tanggal 03 Juli 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ALWI**  
 Nomor Pokok : 10564 01696 12  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
 Alamat : Jl. Sili Alapudin No. 25B, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" EVALUASI PROGRAM GAMMARA SEBAGAI CITY BRAND DI KOTA JENEPONTO "**

Yang akan dilaksanakan dari Tgl. 09 Juli s/d 12 Agustus 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada penerapannya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian

Demikian Surat Keterangan ini ribenkan agar diproses sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 08 Juli 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar  
 2. Arsip







## PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tahak Iskandar No. 30 Bontotungga Telp. (0419) 2410044 Kode Pos. 92311

#### IZIN PENELITIAN

Nomor: 73.4/136/IP/DPMPTSP/VII/2019

#### DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Nomor : 138/VII/REK-IP/DPMPTSP/2019

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : Alwi  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Nomor Pokok : 105640163612  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Tanjung Bira Kel. Sambung Jaya Kec. Manajang  
Tempat Meneliti : Dinas Lingkungan Hidup

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul :

#### **EVALUASI PROGRAM "GAMMARA" SEBAGAI CITY BRAND DI KABUPATEN JENEPONTO**

Lamanya Penelitian : 09 Juli 2019 s/d 12 Agustus 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto Cq. Bidang Penelitian & Pengembangan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang Izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 09 Juli 2019

KEPALA DINAS,



**Hi. MERNAWATI, S. IP. M. Si**

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19771231 290212 2 015

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto
2. Arsip













## RIWAYAT HIDUP



**ALWI**, Lahir di Kota Makassar pada Tanggal 09 Januari 1995. Anak Kedua dari pasangan H. Hanafi dan Hj. Nurhasni. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD BALANG BARU pada tahun 2006. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di MTS DARUL ARQAM GOMMARA dan tamat pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA DARUL ARQAM GOMMARA dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2019 ini akan mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Program Gammara Sebagai *City Brand* di Kabupaten Jeneponto”.